

PENGARUH PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAMARINDA

Oleh:
Rabiah

Abstrak

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawaman Samarinda

Rabiah. Pengaruh Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Di bimbing oleh Bapak Sjamsu Djohan dan Agus Junaidi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Samarinda.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Selain itu juga dibantu sistem komputerisasi (*Program Statistical Product and Service Solution*) (SPSS) versi 20,0. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2005 sampai 2016.

Berdasarkan hasil analisis bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh angka R dan Rsquare menunjukkan bahwa pajak daerah (variabel bebas) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. Hal ini berarti bahwa pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat kuat yaitu pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh variabel pajak daerah sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

Kata Kunci : Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Abstrack

Rabiah. The Effect of Tax on Local Income Increase (PAD) of Samarinda City. In guiding by Sjamsu Djohan and Agus Junaidi.

This study aims to determine the effect of local taxes on the increase of local revenue (PAD) in the city of Samarinda.

Analyzer used in this research use simple linier regression. It is also assisted by computerized system (Program Statistical Product and Service Solution) (SPSS) version 20.0. The type of data used is secondary data contained in the Samarinda City Revenue Office in 2005 to 2016.

Based on the results of analysis that local taxes have a positive and signifikan effect on the local revenue in the cityof Samarinda. From the calculation of correlation coefficient obtained the number of R and Rsquare show that the local tax (independent variable) has a very strong relationship to the local revenue in the city of Samarinda. This means that the influence between independent variables with the dependent variable is very strong that the original revenue area is influenced by local tax variables while the rest is influenced by other factors.

Keywords: Local Tax and Local Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan, dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Pajak merupakan kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut (Anastasia Diana dan Lilies, 2009). Dengan diberlakukannya sistem Self Assesment maka wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada didaerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diizinkan memungut sebelas jenis pajak daerah, diantaranya pajak reklame.

Usaha reklame di kota Samarinda sudah ada sejak empat belas tahun lebih, karena Samarinda merupakan tempat jalur yang strategis di Provinsi Kalimantan Timur , menyebabkan banyak investor/ pengusaha baik dari dalam maupun dari luar yang masuk dan membuka usaha di Samarinda. Karna reklame merupakan senjata yang paling ampuh dalam mempengaruhi konsumen dalam pola konsumtif mereka, Oleh karena itu perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi baik untuk memperkenalkan maupun memasarkan produknya menggunakan media reklame. Perkembangan jumlah reklame pun cukup meningkat tajam beberapa tahun dan memiliki potensi yang sangat baik karena di dukung letak kota Samarinda yang strategis.

Peningkatan yang cukup pesat dalam jumlah reklame yang ada tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah Kota.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

Pembangunan ekonomi selama pemerintah Orde Baru yang lebih yang lebih terfokus pada pertumbuhan ternyata tidak membuat banyak daerah-daerah di tanah air berkembang dengan baik. Proses pembangunan dan peningkatan kemakmuran sebagai hasil dan pada pembangunan selama masa itu lebih terkonsentrasi Di pusat. Pada tingkat nasional memang

laju pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan perkapita naik terus setiap tahun (hingga krisis terjadi).

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sejak pemerintah orde baru hingga diberlakukannya Otonomi Daerah (OD) menyebabkan relative kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam komponen APBD. Menurut UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan pemerintah yang diberikan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan, pembiayaan, saran dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas perlu kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah serta propinsi dan kabupaten/kota. Oleh karna itu setiap kewenangan keuangan yang melekat pada kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*), pemerataan dan keadilan (*equity*), serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) peningkatan partisipatif aktif masyarakat.

Dengan adanya otonomi, pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis karena dilakukan oleh sumber daya manusia itu sendiri yang lebih dulu dibutuhkan.

2.2. Keuangan Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan yang di miliki suatu daerah dalam mengurus daerahnya sendiri adalah salah satunya dengan melihat pada kemampuan keuangan daerah yang di milikinya. Menurut Supriatna (2003:56) definisi Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi, berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD)”. Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara ataupun daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut Mamesah (2004:2) meliputi :

- a. Pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- c. Anggaran Pendapatan Asli Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah sistem pembagiaan keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Karena itu, pengertian keuangan daerah daerah selalu melekat dengan APBD yaitu, suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan, selain itu, APBD

merupakan salah satu alat untuk public dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan ekonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dan dekonsentrasi (PP No. 104

a. berdasarkan keahlian dengan pandangan yang bijaksana.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah yang terdiri atas :

1. Laporan Realisasi APBD
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib membuat perhitungan APBD yang membuat perbandingan antara realisasi APBD. Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dan anggran penerimaan maupun antara realisasi pengeluaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Potensi Pendapatan Derah Kota Samarinda

Pendapatan Daerah Samarinda pendapatan yang diperoleh dari beberapa sektor yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan. dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Tabel tentang Pendapatan Daerah Kota Samarinda selama 12 tahun Terakhir yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 dapat dikemukakan sebagai berikut:

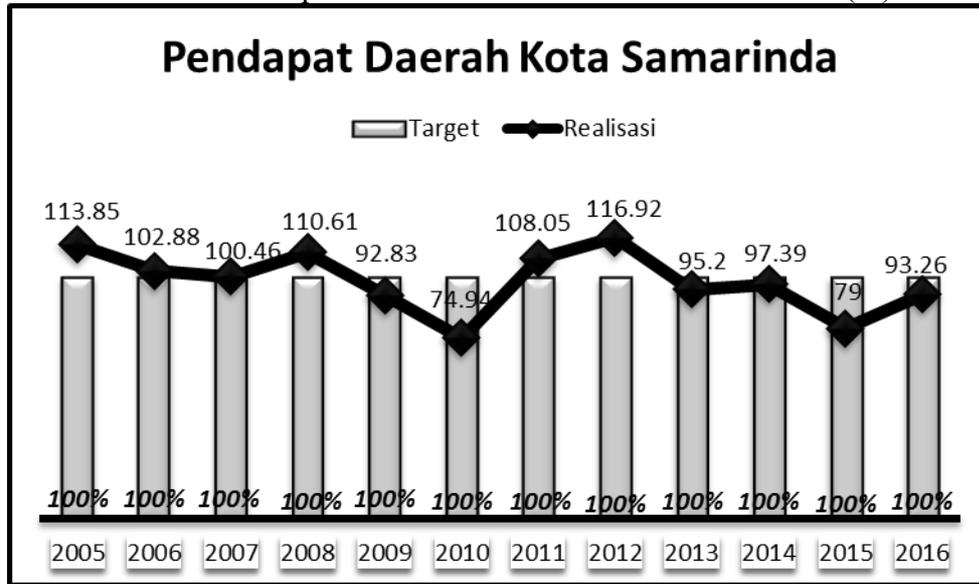
Tabel 4.1 Total Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2005-2016

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2005	767.117.161.907.00	873.360.609.930.20	113.85
2	2006	1.317.494.415.414.00	1.355.477.551.297.17	102.88
3	2007	1.277.340.158.760.00	1.283.166.564.370.32	100.46
4	2008	1.427.947.519.845.00	1.579.482.350.532.00	110.61
5	2009	1.738.235.561.635.00	1.613.753.452.781.00	92.83
6	2010	2.035.031.417.531.00	1.525.046.621.612.59	74.94
7	2011	1.914.290.354.872.00	2.068.470.073.728.48	108.05
8	2012	2.312.250.128.138.00	2.703.368.601.769.90	116.92

9	2013	2.697.071.997.283.01	2.567.673.073.696.33	95.20
10	2014	3.068.240.425.316.26	2.988.088.858.748.37	97.39
11	2015	3.604.922.777.433.00	2.847.805.750.674.01	79.00
12	2016	2.613.861.928.835.27	2.437.700.767.930.07	93.26

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Grafik 4.1 Total Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2005-2016 (%)



Sumber : Dinas

Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa Pendapatan Daerah dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 Terus berfluktuatif baik dari sisi target pendapatan maupun realisasi pendapatan yang diperoleh. dimana Pendapatan Daerah pada tahun 2012 merupakan pendapatan paling tinggi yaitu sebesar Rp. 2.703.368.601.769,90 (116%) sedangkan pendapatan pada tahun 2010 merupakan pendapatan paling kecil yaitu sebesar Rp. 1.525.046.621.612,59(74,94%)

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Dalam penulisan ini dapat diberikan definisi secara operasional yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sumber-sumber pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Samarinda yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam hal ini yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilihat dari kurun waktu 11 tahun anggaran yaitu dari tahun 2005-2013.
2. Pajak Daerah adalah hasil realisasi penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda dari pungutan yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah yang menerima imbalan langsung yang seimbang dan dipaksakan tanpa balas jasa, sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang dilihat dari kurun waktu 9 tahun yaitu dari tahun 2005-2013.
3. Pajak Reklame (X) adalah pajak atas penyelenggaraan reklame oleh pemerintah daerah kepada orang atau pribadi yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 140 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya atau kerugian tertentu/bersama. dengan melihat kontribusi Retribusi Jasa Umum dengan periode 2005-2013 Guritno, dikutip oleh Erdidharma, (2011:41).

3.2 Rincian Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penulisan ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, Pengelolaan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur.

Adapun data-data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data Realisasi dan Target Penerimaan Pajak reklame Kota Samarinda (tahun 2005-2016)
2. Data Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Samarinda (tahun 2005-2016).
3. Data Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda (tahun 2005-2016).

3.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis akan mengadakan penelitian ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dimana terdapat mengenai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda serta terdapat target dan realisasi Pajak Reklame untuk memfokuskan pada kontribusi serta prospek pajak daerah khususnya Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Kota Samarinda sesudah pelaksanaan otonomi daerah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber. Agar didapat data yang sesuai dengan karya tulis yang akan dibuat :

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yaitu buku, direktori, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat dimana

- a. Variabel bebas adalah Pajak Reklame
- b. Variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah.

3.5 Alat Analisis

Teknik alat analisis yang data yang digunakan dalam mengolah dan menginterpretasikan data secara kuantitatif adalah melalui alat bantu statistic yaitu analisis korelasi. Analisis Korelasi adalah kelompok teknik untuk mengukur kuatnya hubungan antara dua variabel. Analisis ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Menurut Abdul Halim (2001), untuk mengetahui kontribusi dari pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ahmad Yani, 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anonim, 2000. *Undang-undang Otonomi Daerah 1999 & Juklak*, Sinar Grafika. Jakarta.
- , *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Tentang Pajak Daerah*.
- , *UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*
- , *UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah..*
- , *UU No.33 Tahun 2004 pasal 6 Tentang Sumber-sumber Pendapatan asli daerah.*
- , *UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- , *UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..*
- , *Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Keuangan Daerah.*
- , *Pemendagri No. 59 Tahun 2007 pasal 1 ayat 50 Tentang Pendapatan Daerah.*
- , *Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah.*
- , *Peraturan Daerah Kota Samarinda No.15 tahun 2011, Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.*
- Anonim, 2000. *Undang-undang Otonomi Daerah 1999 & Juklak*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Bastian, 2002. *Pendapatan asli daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Bisnis Indonesia, 21 April, 2012. *Potensi Pajak Reklame Besar*, hlm. 10.
- Bohari. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Brata Kusuma. 2002. *Pendapatan Asli Daaerah*. Jakarta
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI-Press.
- Devas, Nick., dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilies. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi
- Erdidharma, Afwa. 2012. *Skripsi, Analisis Kontribusi dan Prospek Retribusi Terminal Terhadap Pembentukan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husaini dan Purnomo. 2006. *Pengantar statistika*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Iqbal, Hasan. 2005. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Koswara, 2004. *Komponen Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta.
- Liberty Pandiangan, 2002. *Undang-undang Perpajakan Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Mamesah, 2004. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi kedua, Cetakan pertama, Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Murrey dan Larry. 2007. *Statistik Edisi ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Pratiwi, 2007. *Proporsi Pendapatan asli daerah*. Rajawali. Jakarta.

- Rozzaq, Gozzali Ar. 2010. *Skripsi, Kontibusi dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siahaan, P. Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Siahaan, M.P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada
- Sugiono, 1999, *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sumitro, rahmat. 2004. *Pajak daerah*. Jakarta.
- Suparmoko M. 1999. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta:BPFE.
- Supriatna, Cahya. 2003. *Perusahaan Daerah*. Jakarta.
- Widjaja, 2002. *Pendapatan Asli Daerah*. UI. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuni. 2004. *Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM*, Yogyakarta.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Hasil penelitian mengenai analisis potensi pajak reklame kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan perhitungan, perbandingan antara realisasi yang diterima Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda dengan potensi pajak reklame yang ada, ternyata potensi pajak reklame yang ada masih diatas realisasi yang diterima Dispenda, nilainya pun dari tahun 2005 hingga 2016 selalu lebih tinggi dibandingkan realisasi yang diterima Dispenda. Hal ini terjadi karena masih ada potensi pajak yang